



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG



2
0
2
4

PERUBAHAN RENCANA KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188/ 90 /415.23/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan menetapkan dalam Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
7. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4.2/325/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan (RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024;
2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024;
4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan

kerja yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Membebaskan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



ENDRO WAHYUDI S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 198005281999121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188/ 90 /415.23/2024
TANGGAL : 22 Juli 2024

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Anggota	Kabid Persandian dan Statistik Kabid Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Kabid Aplikasi Teknologi Informasi Perencana Ahli Muda,

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**


ENDRO WAHYUDI S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19800528 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 91 /415.23/2024

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD sesuai tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tentang **P e r u b a h a n Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
19. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4.2/325/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan.
- KEEMPAT : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Jombang Tahun 2024 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran.

KELIMA : Perubagan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

ENDRO WAHYUDI S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 198005281999121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka disusunlah Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tujuan RPD.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Jombang, 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



ENDRO WAHYUDI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 198005281999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	80
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	83
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	92
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	95
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan.....	97
BAB IV PENUTUP.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2024.....	107
-------	-----	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebuah dokumen perencanaan sampai periode satu tahun 2024 dengan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah, sebagai satu kesatuan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Perubahan Renja Tahun 2024 memuat target sasaran/indikator kinerja daerah tahun 2024 yang disepakati dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, Program pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2024, Pokok-pokok pikiran DPRD, dan target dan capaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ringkasan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD sebagai instansi yang baru. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan dan tupoksi sebagai berikut :

a. Urusan

1. Perumusan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan riil penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu antara lain pada :

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- e. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
- h. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 100.3.4.2/325/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan

program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan. Perubahan Renja Tahun 2024 dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsinya sampai dengan periode tahun 2024.

1..2 Tujuan

Tujuan penyusunan P e r u b a h a n Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai acuan menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN AWAL RENJA PD

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

- **BAB IV PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang telah disahkan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 15.791.260.886 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.792.622.443 (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 36,68%.

Dari Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun capaian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan evaluasi program Peningkatan Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan

dokumen perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2024 sebesar Rp. 25.888.000 maka didapatkan keluaran (output) utamanya Jumlah dokumen 3 (tiga) dokumen meliputi Renja, Renja Perubahan dan Renstra Perubahan.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 16.292.000 dan realisasi kinerja berupa . Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 62.93%.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diarahkan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan dokumen evaluasi kinerja dan pelaporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2024 sebesar Rp. 26.008.000 maka didapatkan keluaran (output) utamanya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sebanyak 5 (lima) laporan, Laporan Renja Tribulan I, II, III, IV dan LKjiP.

Penyerapan anggaran sampai tribulan II terealisasi sebesar Rp.4.940.000 18.99% dan capaian kinerja meliputi Renja Tribulan I dan II.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah untuk pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu serta pemenuhan penyusunan laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN daerah diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah penyediaan gaji dan

tunjangan ASN. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2024 sebesar Rp. 4.977.234.782 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah mewujudkan penyediaan gaji dan tunjangan selama 14 kali. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu sebesar 100 %.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II terealisasi sebesar Rp. 2.661.640.174 dengan persentase sebesar 53,4 %. Capaian kinerja berupa pencairan gaji dan tunjangan Januari s.d Juni 2024.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD dengan target 4 dokumen meliputi Laporan Keuangan Trib I sampai dengan IV.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 209.506.000 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Penyerapan anggaran sampai tribulan II terealisasi sebesar Rp. 95.778.000 dengan capaian penyerapan anggaran tribulan II tahun 2024 sebesar 45,72%. Realisasi indikator kegiatan yaitu Laporan Keuangan tribulan I dan tribulan II.

c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 Laporan. Anggaran yang tersedia dari APBD tahun 2024 sebesar Rp. 4.720.000

Penyerapan anggaran sampai tribulan II terealisasi sebesar Rp. 3.408.000 Capaian penyerapan anggaran sebesar 72,20%. Untuk realisasi kinerja berupa laporan keuangan tahunan disusun pada bulan Desember 2024.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah meliputi jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target 12 paket. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2024 sebesar Rp. 13.819.800.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 6.719.000 dan capaian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 48.62%. Realisasi kinerja berupa pembayaran komponen instalasi listrik/penerangan Januari s.d Juni 2024.

b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 12 paket. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 104.912.800.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 28.460.000 dengan sebesar 27,13% yang dipergunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi pada bulan Januari s.d Juni.

c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 paket. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 127.285.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 35.591.960. Capaian penyerapan anggaran sebesar 28,75% yang dipergunakan untuk penyediaan bahan logistik kantor dengan keluaran(output) berupa fasilitasi kegiatan pemerintah daerah yaitu spanduk, bendera dan mamin harian pegawai.

e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 51.868.700.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 16.684.500. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 32,17% yang dipergunakan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa foto copy dan cetak amplop, blanko bahan bakar, stofmap & tata naskah dinas.

f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 3 dokumen. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 12.612.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 4.260.000. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 33,78% yang dipergunakan untuk penyediaan barang bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan keluaran berupa surat kabar dan majalah.

g. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah

yang meliputi jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 108.662.550 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 5 laporan.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 64.223.009. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 59,10% yang dipergunakan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan keluaran (output) perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, mamin jamuan tamu dan mamin rapat.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi penyediaan jasa konsumsi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di arahkan untuk pemenuhan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 393.000.000

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 152.535.200 Capaian penyerapan anggaran sebesar 38.81% yang dipergunakan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada bulan Januari s.d Juni 2024.

b. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di arahkan untuk pemenuhan jenis pelayanan umum. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 318.955.400 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 137.550.016 capaian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 43,13% yang dipergunakan untuk pemenuhan jenis pelayanan umum kebersihan kantor, honorarium non ASN dan asuransi jaminan kesehatan bagi Non ASN pada bulan Januari s.d Juni.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 42.110.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 21.666.980 Capaian penyerapan anggaran sebesar 51,45% yang berupa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 unit.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diarahkan untuk Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan Perizinanya. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 232.374.610.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 38.812.200
Capaian penyerapan anggaran sebesar 16,70% berupa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 17 unit.

- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diarahkan untuk jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yang meliputi jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Kominfo yang dipelihara dengan target 2 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 106.342.475.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 80.626.246 dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 75,82% yang berupa pemeliharaan di Gedung Kominfo dan Gedung Radio SJFM.

- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diarahkan untuk jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 63 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 292.574.780.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 186.265.000
Capaian penyerapan anggaran sebesar 63,66% yang berupa pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana gedung kantor.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diarahkan untuk pemenuhan bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik, dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

1) Kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah diarahkan untuk penyebaran informasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Media Komunikasi Publik diarahkan untuk Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target 3 dokumen berupa Pelaksanaan Pengelolaan Radio SJFM, tatap muka (warjok, sosialisasi, goes to campus) dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan anggaran Rp. 1.218.354.900.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 402.637.700. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 34,51%

b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik diarahkan untuk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dengan target 2 dokumen yaitu Kegiatan PPID dan Lapor SP4N. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 189.646.690.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 81.667.300. Capaian penyerapan anggaran sebesar 43.06 %.

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik diarahkan untuk publikasi kegiatan pemerintah kabupaten Jombang yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik berupa pengelolaan media cetak, media elektronik dan media sosial. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 1.218.354.900.

Penyerapan anggaran tribulan II sebesar Rp. 775.924.900 dan capaian penyerapan anggaran 63.69%.

3. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan untuk pemenuhan bidang aplikasi informatika , dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

1) Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota diarahkan untuk fasilitasi koneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang, pemeliharaan jaringan intra dan penataan Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen yaitu dokumen penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain dengan anggaran 55.771.920.

Penyerapan anggaransampai dengan tribulan II mencapai Rp. 16.020.195 dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 28.72%.

- b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah diarahkan untuk Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan target 1 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 3.201.908.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 208.080.570 dan capaian penyerapan anggaran yaitu 2.2%.

2) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk pengembangan Aplikasi yang terintegrasi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk Jumlah Dokumen

Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target 2 dokumen. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 441.845.500.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 12.244.500 dengan capaian 2.77%. Realisasi kinerja berupa 1 dokumen yaitu SK Sekretaris Daerah Terkait Tim Kerja Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah diarahkan untuk Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola dengan target 1 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 685.299.079.

Penyerapan anggaran pada tribulan II sebesar Rp. 7.908.300 dengan capaian anggaran 1.15%. Realisasi kinerja berupa pengelolaan dan pemeliharaan pusat data di Ruang Server Dinas Kominfo.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik diarahkan untuk Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan dengan target 2 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 660.796.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 127.915.803 atau 19.36%. Realisasi kinerja berupa pembuatan aplikasi Data Kepegawaian (e-office) dan Keuangan (e-monev).

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diarahkan untuk Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan target 2 layanan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 87.500.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai 1.187.500 atau 1.36% dengan realisasi kinerja berupa layanan pada aplikasi Data Kepegawaian (e-office) dan Keuangan (e-monev).

e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas diarahkan untuk Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City dengan target 1 dokumen. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar 401.750.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 99.500.000 dengan realisasi 24.77%. Realisasi kinerja berupa Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

f. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah diarahkan untuk Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan target 1 dokumen. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar 29.700.000. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 2.137.500 dengan realisasi 7.2%.

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral diarahkan untuk penyusunan dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang melalui sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral diarahkan untuk Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan target 2 dokumen. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 173.118.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 156.783.298 atau 90.56%. Realisasi kinerja berupa Dokumen Penyusunan Indeks Kematangan TIK Tahun 2024 dan Dokumen Penyusunan Indeks PIKP Tahun 2024 telah tersusun.

b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Membangun Metadata Statistik Sektoral diarahkan untuk pemenuhan Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun dengan target 1 dokumen. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 70.598.000.

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 57.253.600 atau 81.10%. Realisasi kinerja berupa telah tersusunnya Dokumen Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Jombang Tahun 2024.

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dengan target 53 Perangkat Daerah. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 105.896.800.
- Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 9.374.388 atau 8.85%.
- b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan dengan target 1 dokumen. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 11.654.900.
- Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 9.901.000 atau 84.95% dengan realisasi kinerja SK AGen CSIRT Tahun 2024.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik diarahkan untuk Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan target 1 Laporan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 99.767.000.
- Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 7.647.253 atau 7.67 dengan realisasi kinerja 1 laporan yaitu Laporan Serangan Cyber.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sampai dengan tribulan II Tahun 2024, pelaksanaan indikator kinerja disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tupoksi sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
 - Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang terhubung dengan aksesinternet dan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 53 OPD. Jaringan Intra Pemerintah Daerah menggunakan koneksi Fiber Optic (FO).
 - Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang yang menggunakan aksesinternet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 53 OPD dengan total bandwith 1,5 Gigabyte.
 - Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. Penyediaan bandwith yang cukup untuk OPD yang bisa digunakan untukakes internet, berbasis suara, video, teks data dan sinyal
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
 - Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 Layanan publik di Pemkab Jombang yang dimanfaatkan secara online dan terintegrasi sebagai berikut :

**DAFTAR LAYANAN
LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI
TAHUN 2024**

NO	LAYANAN	SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI (YA/TIDAK)	NAMA APLIKASI	UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	LAYANAN PERENCANAAN	YA	1 SIPD	BAPPEDA
		YA	2 PIPA	BAPPEDA
2	LAYANAN PENGANGGARAN	YA	3 SIPD	BPKAD
3	LAYANAN KEUANGAN	YA	4 SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BPKAD
4	LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	YA	5 SPSE	BAG. PBJ
		YA	6 SIBAJA	BAG. PBJ
5	LAYANAN KEPEGAWAIAN	YA	7 SIAP-ASN	BKPSDM
6	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	YA	8 SRIKANDI	DISPERSIP
7	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	YA	9 SIMDA BMD	BPKAD
		YA	10 e-BMD	BPKAD
8	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	YA	11 E-AUDIT	INSPEKTORAT
9	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	YA	12 BRAVO	BAG. ORGANISASI
10	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	YA	13 E-OFFICE	BAG. ORGANISASI
11	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	YA	14 LAPOR SP4N	DISKOMINFO
12	LAYANAN DATA TERBUKA	YA	15 SAMBANG	DISKOMINFO
		YA	16 INTUISI	DINSOS
13	LAYANAN JDIH	YA	17 JDIH	BAG. HUKUM
LAYANAN PUBLIK				
14	LAYANAN PUBLIK 1 (LAYANAN PERIZINAN)	YA	18 SIRINDUNONA	DPMPSTP
15	LAYANAN PUBLIK 2 (LAYANAN PAJAK DAERAH)	YA	19 SIMPADU	BAPENDA
16	LAYANAN PUBLIK 3 (LAYANAN DESA)	YA	20 SABDOPALON	DPMPD

17	LAYANAN PUBLIK 4 (LAYANAN KEPENDUDUKAN)	YA	21 DUKCAPIL YAONAH	DUKCAPIL
18	LAYANAN PUBLIK 5 (LAYANAN LABORATORIUM)	YA	22 SILAJANG	DLH

- Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

53 OPD yang memiliki web sesuai standart x 100% = 100%

53 OPD yang ada di Kabupaten Jombang

REKAPITULASI DATA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB SESUAI STANDART

TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PLATFORM	NAMA WEB SESUAI STANDART
1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	WEBSITE	bkpsdm.jombangkab.go.id
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	WEBSITE	bapenda.jombangkab.go.id
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/bpkad
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	WEBSITE	bappeda.jombangkab.go.id
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/bpbd
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/kesbangpol
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	WEBSITE	perizinan.jombangkab.go.id
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/kominfo
9	DINAS PERHUBUNGAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/perhubungan
10	DINAS PERTANIAN	WEBSITE	pertanian.jombangkab.go.id
11	DINAS PETERNAKAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/peternakan

12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/dkpp
13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	WEBSITE	disdagrin.jombangkab.go.id
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/dinkopum
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	WEBSITE	sikembang.jombangkab.go.id
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	WEBSITE	disdikbud.jombangkab.go.id
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/dpmd
18	DINAS TENAGA KERJA	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/disnaker
19	DINAS SOSIAL	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/sosial
20	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	WEBSITE	pupr.jombangkab.go.id
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/perkim
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	WEBSITE	dlh.jombangkab.go.id
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/perpusarsip
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/ppkb-dan-pppa
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	WEBSITE	dukcapil.jombangkab.go.id
26	DINAS KESEHATAN	WEBSITE	dinkes.jombangkab.go.id
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/satpol-pp
28	INSPEKTORAT	WEBSITE	inspektorat.jombangkab.go.id
29	KECAMATAN JOMBANG	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/jombang
30	KECAMATAN TEMBELANG	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/tembelang
31	KECAMATAN PLANDAAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/plandaan
32	KECMATAN PLOSO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/ploso

33	KECAMATAN KABUH	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/kabuh
34	KECAMATAN KUDU	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/kudu
35	KECAMATAN NGUSIKAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/ngusikan
36	KECAMATAN KESAMBEN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/kesamben
37	KECAMATAN PETERONGAN	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/peterongan
38	KECAMATAN MOJOAGUNG	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/mojoagung
39	KECAMATAN SUMOBITO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/sumobito
40	KECAMATAN MOJOWARNO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/mojowarno
41	KECAMATAN BARENG	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/bareng
42	KECAMATAN WONOSALAM	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/wonosalam
43	KECAMATAN NGORO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/ngoro
44	KECAMATAN GUDO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/gudo
45	KECAMATAN PERAK	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/perak
46	KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/bandarkedungmulyo
47	KECAMATAN MEGALUH	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/megaluh
48	KECAMATAN DIWEK	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/diwek
49	KECAMATAN JOGOROTO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/jogoroto
50	SEKRETARIAT DAERAH	WEBSITE	jdih.jombangkab.go.id
		WEBSITE	sibaja.jombangkab.go.id
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/pembangunan
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/kesra
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/organisasi

		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/pengadaan-barang-dan-jasa
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/perekonomian
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/Perencanaan%20dan%20Keuangan
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/prokopim
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/pemerintahan
		WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/umumperlengkapan
51	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/sekretariat-dprd
52	RSUD JOMBANG	WEBSITE	rsudjombang.jombangkab.go.id
53	RSUD PLOSO	WEBSITE	jombangkab.go.id/opd/rsudploso
TOTAL WEBSITE			63

Keterangan : Sekretariat Daerah dihitung 1 Perangkat daerah

OPD yang belum memiliki website sesuai dengan penamaan domain sesuai dengan PERMEN no 28 Tahun 2006 tentang domain go.id difasilitasi dalam portal website Pemkab Jombang dengan alamat www.jombangkab.go.id. Halaman website jombangkab memiliki halaman utama, terdapat pula subpage 53 OPD yang dikelola oleh masing-masing OPD Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

53 PD mengaplikasikan aplikasi umum dan khusus x 100% = 100%
53 PD yang ada di Kabupaten Jombang

**DATA APLIKASI UMUM DAN APLIKASI KHUSUS
KABUPATEN JOMBANG YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
Tahun 2024**

NO	NAMA APLIKASI	NAMA SUB DOMAIN	JUMLAH PD PENGGUNA
1	LAPOR SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)	www.lapor.go.id	53 Perangkat Daerah
2	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	jombangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah	53 Perangkat Daerah
3	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	jdih.jombangkab.go.id	53 Perangkat Daerah
4	SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	lpse.jombangkab.go.id/eproc4/	53 Perangkat Daerah
5	Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	srikandi.arsip.go.id	53 Perangkat Daerah

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

22 layanan publik & administrasi pemerintahan x 100% = 100%
22 layanan

Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan tercapai 100%. Layanan SPBE yang tercantum sebagai berikut:

**DAFTAR LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SESUAI DOKUMEN PROSES BISNIS**

TAHUN 2024

NO	LAYANAN	SESUAI DOKUMEN PROSES BISNIS (YA/TIDAK)	NAMA APLIKASI	UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	LAYANAN PERENCANAAN	YA	1 SIPD	BAPPEDA
		YA	2 PIPA	BAPPEDA

2	LAYANAN PENGANGGARAN	YA	3	SIPD	BPKAD
3	LAYANAN KEUANGAN	YA	4	SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BPKAD
4	LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	YA	5	SPSE	BAG. PBJ
		YA	6	SIBAJA	BAG. PBJ
5	LAYANAN KEPEGAWAIAN	YA	7	SIAP-ASN	BKPSDM
6	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	YA	8	SRIKANDI	DISPERSIP
7	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	YA	9	SIMDA BMD	BPKAD
		YA	10	e-BMD	BPKAD
8	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	YA	11	E-AUDIT	INSPEKTORAT
9	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	YA	12	BRAVO	BAG. ORGANISASI
10	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	YA	13	E-OFFICE	BAG. ORGANISASI
11	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	YA	14	LAPOR SP4N	DISKOMINFO
12	LAYANAN DATA TERBUKA	YA	15	SAMBANG	DISKOMINFO
		YA	16	INTUISI	DINSOS
13	LAYANAN JDIH	YA	17	JDIH	BAG. HUKUM
LAYANAN PUBLIK					
14	LAYANAN PUBLIK 1 (LAYANAN PERIZINAN)	YA	18	SIRINDUNONA	DPMPTSP
15	LAYANAN PUBLIK 2 (LAYANAN PAJAK DAERAH)	YA	19	SIMPADU	BAPENDA
16	LAYANAN PUBLIK 3 (LAYANAN DESA)	YA	20	SABDOPALON	DPMPD
17	LAYANAN PUBLIK 4 (LAYANAN KEPENDUDUKAN)	YA	21	DUKCAPIL YAONAH	DUKCAPIL
18	LAYANAN PUBLIK 5 (LAYANAN LABORATORIUM)	YA	22	SILAJANG	DLH

KETERANGAN :

JUMLAH APLIKASI LAYANAN PEMERINTAHAN : 17 APLIKASI

JUMLAH APLIKASI LAYANAN PUBLIK : 5 APLIKASI

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasipemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat

elektronik

$$22/22 \times 100\% = 100\%$$

**DAFTAR LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG MEMANFAATKAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK
TAHUN 2024**

NO	LAYANAN	MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (YA/TIDAK)	NAMA APLIKASI	UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	LAYANAN PERENCANAAN	YA	1 SIPD	BAPPEDA
		YA	2 PIPA	BAPPEDA
2	LAYANAN PENGANGGARAN	YA	3 SIPD	BPKAD
3	LAYANAN KEUANGAN	YA	4 SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BPKAD
4	LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	YA	5 SPSE	BAG. PBJ
		YA	6 SIBAJA	BAG. PBJ
5	LAYANAN KEPEGAWAIAN	YA	7 SIAP-ASN	BKPSDM
6	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	YA	8 SRIKANDI	DISPERSIP
7	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	YA	9 SIMDA BMD	BPKAD
		YA	10 e-BMD	BPKAD
8	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	YA	11 E-AUDIT	INSPEKTORAT
9	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	YA	12 BRAVO	BAG. ORGANISASI
10	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	YA	13 E-OFFICE	BAG. ORGANISASI
11	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	YA	14 LAPOR SP4N	DISKOMINFO
12	LAYANAN DATA TERBUKA	YA	15 SAMBANG	DISKOMINFO
		YA	16 INTUISI	DINSOS
13	LAYANAN JDIH	YA	17 JDIH	BAG. HUKUM
LAYANAN PUBLIK				
14	LAYANAN PUBLIK 1 (LAYANAN PERIZINAN)	YA	18 SIRINDUNONA	DPMPTSP

15	LAYANAN PUBLIK 2 (LAYANAN PAJAK DAERAH)	YA	19 SIMPADU	BAPENDA
16	LAYANAN PUBLIK 3 (LAYANAN DESA)	YA	20 SABDOPALON	DPMPD
17	LAYANAN PUBLIK 4 (LAYANAN KEPENDUDUKAN)	YA	21 DUKCAPIL YAONAH	DUKCAPIL
18	LAYANAN PUBLIK 5 (LAYANAN LABORATORIUM)	YA	22 SILAJANG	DLH

KETERANGAN :

JUMLAH APLIKASI LAYANAN PEMERINTAHAN : 17 APLIKASI

JUMLAH APLIKASI LAYANAN PUBLIK : 5 APLIKASI

- Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26 Sistem Elektronik	$\times 100\% = 100\%$
26 sistem elektronik	

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG TERDAFTAR SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan (YA/TIDAK)	Keterangan
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Mail	YA	Layanan Email Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang
		2	Web Jombangkab	YA	Layanan Website Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang
		3	SAMBANG	YA	Layanan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Jombang
		4	Streaming SJFM	YA	Sistem Informasi Streaming Radio Suara Jombang
		5	CLOUD	YA	Layanan database
		6	SIDAVID	YA	Sistem Informasi Data Covid
		7	e-Office	YA	Sistem Informasi Kepegawaian
		8	Serapan	YA	Sistem Informasi Serapan Anggaran

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan (YA/TIDAK)	Keterangan
		9	Satset	YA	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik
2	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	10	BRAVO	YA	Layanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik
	SEKRETARIAT DAERAH (BAG TATA PEMERINTAHAN)	11	Lentera	YA	Layanan Tata Pemerintahan
	SEKRETARIAT DAERAH (BAG HUKUM)	12	JDIH	YA	Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum
	SEKRETARIAT DAERAH (BAG.ORGANISASI)	13	Sukmasantri	YA	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
	SEKRETARIAT DAERAH (BAG PBJ)	14	SIBAJA	YA	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
	SEKRETARIAT DAERAH (PBJ)	15	SPSE	YA	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	16	Simpel ON	YA	Sistem Pelaporan Penyedia Jasa Konstruksi/Konsultan dalam Pelaporan Pekerjaan
4	DINAS PERTANIAN	17	TRAKTOR	YA	Sistem tracking dan monitor berupa data dan informasi potensi wilayah oleh para penyuluh pertanian di wilayah binaan
		18	ADAPTIF	YA	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang
		19	SIMFONI	YA	Sistem Informasi GAPOKTAN
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20	DLH	YA	Layanan Laporan Periodik Pelaksanaan Dokumen AMDAL/ UKL-UPL
		21	SILAJANG	YA	Sistem Informasi Laboratorium Jombang
6	DINAS SOSIAL	22	INTUISI	YA	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)
		23	SIDASU	YA	Sistem Data Sosial Terpadu
7	BADAN PERENCANAAN	24	E-LITBANG	YA	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan (YA/TIDAK)	Keterangan
	PEMBANGUNAN DAERAH	25	SI-PEDAL CANTIG	YA	Sistem integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
		26	PIPA	YA	Sistem Perencanaan Penganggaran
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN RAKYAT	27	SIMENARA	YA	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi
		28	Tarunah	YA	Layanan Tata Ruang dan Pertanahan
9	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	29	SIKEMBANG	YA	Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	SIRINDUNONA	YA	Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Non Berusaha Secara Elektronik
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	31	SIAP-ASN	YA	Layanan Kepegawaian
		32	BKPSDM	YA	Layanan Kepegawaian
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	33	BAPENDA	YA	Layanan Pajak
		34	e-Potensi	YA	Layanan Monitorong Pajak
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	35	SISKEUDES	YA	Sistem Informasi Keuangan Desa
		36	Sabdopalon	YA	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37	DISDIKBUD	YA	Sistem Informasi Pendidikan
		38	PPDB	YA	Sistem Informasi PPDB online
15	DINAS KESEHATAN	39	Si-Imun	YA	Sistem Informasi Imunisasi
		40	Simpus	YA	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
16	SATPOL PAMONG PRAJA	41	Simmas	YA	Satuan Perlindungan Masyarakat
17	INSPEKTORAT	42	e-audit	YA	Sistem e-audit
18	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL	43	Dukcapil	YA	Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	KECAMATAN MOJOWARNO	44	Sigap	YA	Sistem Standar Pelayanan Kecamatan Mojowarno

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan (YA/TIDAK)	Keterangan
20	KECAMATAN PLANDAAN	45	Sipaduka	YA	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	46	Data-srikandi	YA	Layanan Data Srikandi
		47	template	YA	Template Naskah Srikandi
		48	INLIS DISPERSIP	YA	Manajemen Perpustakaan yang Terintegrasi

- Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah. Aplikasi yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah yaitu 100% sebagai berikut:

22 layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terhubung API

_____x100% =

100%

22 layanan publik dan layanan administrasi

**DAFTAR LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
TAHUN 2024**

NO	LAYANAN	TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (YA/TIDAK)	NAMA APLIKASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	LAYANAN PERENCANAAN	YA	1 SIPD	BAPPEDA
		YA	2 PIPA	BAPPEDA
2	LAYANAN PENGANGGARAN	YA	3 SIPD	BPKAD
3	LAYANAN KEUANGAN	YA	4 SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BPKAD
4	LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	YA	5 SPSE	BAG. PBJ
		YA	6 SIBAJA	BAG. PBJ
5	LAYANAN KEPEGAWAIAN	YA	7 SIAP-ASN	BKPSDM
6	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	YA	8 SRIKANDI	DISPERSIP
7	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	YA	9 SIMDA BMD	BPKAD
		YA	10 e-BMD	BPKAD

8	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	YA	11	E-AUDIT	INSPEKTORAT
9	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	YA	12	BRAVO	BAG. ORGANISASI
10	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	YA	13	E-OFFICE	BAG. ORGANISASI
11	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	YA	14	LAPOR SP4N	DISKOMINFO
12	LAYANAN DATA TERBUKA	YA	15	SAMBANG	DISKOMINFO
		YA	16	INTUISI	DINSOS
13	LAYANAN JDIH	YA	17	JDIH	BAG. HUKUM
LAYANAN PUBLIK					
14	LAYANAN PUBLIK 1 (LAYANAN PERIZINAN)	YA	18	SIRINDUNONA	DPMPSTP
15	LAYANAN PUBLIK 2 (LAYANAN PAJAK DAERAH)	YA	19	SIMPADU	BAPENDA
16	LAYANAN PUBLIK 3 (LAYANAN DESA)	YA	20	SABDOPALON	DPMPD
17	LAYANAN PUBLIK 4 (LAYANAN KEPENDUDUKAN)	YA	21	DUKCAPIL YAONAH	DUKCAPIL
18	LAYANAN PUBLIK 5 (LAYANAN LABORATORIUM)	YA	22	SILAJANG	DLH

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah, adalah 53 OPD. Seluruh OPD menggunakan layanan pusat data yang tersentral di Dinas Kominfo.
- Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

$$\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$$

**REKAPITULASI PERANGKAT DAERAH YANG MEMPERBARUI DATA
SESUAI SIKLUS JENIS DATA
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH		MEMPERBARUI DATA SESUAI SIKLUS JENIS DATA (YA/TIDAK)	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1		2	3
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	YA	3 BULAN
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	YA	3 BULAN

3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	YA	3 BULAN
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	YA	3 BULAN
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	YA	3 BULAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	YA	3 BULAN
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	YA	3 BULAN
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	YA	3 BULAN
9	DINAS PERHUBUNGAN	YA	3 BULAN
10	DINAS PERTANIAN	YA	3 BULAN
11	DINAS PETERNAKAN	YA	3 BULAN
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	YA	3 BULAN
13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	YA	3 BULAN
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	YA	3 BULAN
15	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	YA	3 BULAN
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	YA	3 BULAN
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	YA	3 BULAN
18	DINAS TENAGA KERJA	YA	3 BULAN
19	DINAS SOSIAL	YA	3 BULAN
20	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	YA	3 BULAN
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	YA	3 BULAN
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	YA	3 BULAN
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	YA	3 BULAN
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	YA	3 BULAN
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	YA	3 BULAN
26	DINAS KESEHATAN	YA	3 BULAN
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	YA	3 BULAN
28	INSPEKTORAT	YA	3 BULAN
29	KECAMATAN JOMBANG	YA	3 BULAN
30	KECAMATAN TEMBELANG	YA	3 BULAN
31	KECAMATAN PLANDAAN	YA	3 BULAN
32	KECAMATAN PLOSO	YA	3 BULAN
33	KECAMATAN KABUH	YA	3 BULAN
34	KECAMATAN KUDU	YA	3 BULAN
35	KECAMATAN NGUSIKAN	YA	3 BULAN

36	KECAMATAN KESAMBEN	YA	3 BULAN
37	KECAMATAN PETERONGAN	YA	3 BULAN
38	KECAMATAN MOJOAGUNG	YA	3 BULAN
39	KECAMATAN SUMOBITO	YA	3 BULAN
40	KECAMATAN MOJOWARNO	YA	3 BULAN
41	KECAMATAN BARENG	YA	3 BULAN
42	KECAMATAN WONOSALAM	YA	3 BULAN
43	KECAMATAN NGORO	YA	3 BULAN
44	KECAMATAN GUDO	YA	3 BULAN
45	KECAMATAN PERAK	YA	3 BULAN
46	KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO	YA	3 BULAN
47	KECAMATAN MEGALUH	YA	3 BULAN
48	KECAMATAN DIWEK	YA	3 BULAN
49	KECAMATAN JOGOROTO	YA	3 BULAN
50	SEKRETARIAT DAERAH	YA	3 BULAN
51	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	YA	3 BULAN
52	RSUD JOMBANG	YA	3 BULAN
53	RSUD PLOSO	YA	3 BULAN

- Persentase data yang dapat berbagi pakai

$$\frac{5320 \text{ data yang dapat berbagi pakai}}{5320 \text{ data yang dimiliki PD}} \times 100\% = 100\%$$

NO	Jumlah Data Yang Dapat Berbagi Pakai	Jumlah Data Yang Dimiliki Perangkat Daerah
1	2	3
1	5320 Data	5320 Data

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city

$$\frac{26 \text{ PD yang mengimplementasi inovasi}}{53 \text{ PD}} \times 100\% = 49,05\%$$

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASI INOVASI YANG MENDUKUNG SMART CITY
DI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

No	Perangkat Daerah Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Perangkat Daerah Pengguna Sistem Elektronik	Keterangan
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Mail	53 Perangkat Daerah	Layanan Email Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang

No	Perangkat Daerah Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Perangkat Daerah Pengguna Sistem Elektronik	Keterangan
		2	Web Jombangkab	53 Perangkat Daerah	Layanan Website Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang
		3	SAMBANG	53 Perangkat Daerah	Layanan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Jombang
		4	Streaming SJFM	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Streaming Radio Suara Jombang
		5	CLOUD	53 Perangkat Daerah	Layanan database
		6	SIDAVID	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Data Covid
		7	e-Office	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Kepegawaian
		8	Serapan	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Serapan Anggaran
		9	Satset	53 Perangkat Daerah	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik
2	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	10	BRAVO	53 Perangkat Daerah	Layanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik
3	SEKRETARIAT DAERAH (BAG TATA PEMERINTAHAN)	11	Lentera	53 Perangkat Daerah	Layanan Tata Pemerintahan
4	SEKRETARIAT DAERAH (BAG HUKUM)	12	JDIH	53 Perangkat Daerah	Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum
5	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	13	Sukmasantri	53 Perangkat Daerah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
6	SEKRETARIAT DAERAH (BAG PBJ)	14	SIBAJA	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
7	SEKRETARIAT DAERAH (PBJ)	15	SPSE	53 Perangkat Daerah	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
8	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	16	Simpel ON	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Sistem Pelaporan Penyedia Jasa Konstruksi/Konsultan dalam Pelaporan Pekerjaan
9	DINAS PERTANIAN	17	TRAKTOR	DINAS PERTANIAN	Sistem tracking dan monitor berupa data dan informasi potensi wilayah oleh para penyuluh pertanian di wilayah binaan
		18	ADAPTIF	DINAS PERTANIAN	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang
		19	SIMFONI	DINAS PERTANIAN	Sistem Informasi GAPOKTAN
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20	DLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Layanan Laporan Periodik Pelaksanaan Dokumen AMDAL/ UKL-UPL
		21	SILAJANG	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sistem Informasi Laboratorium Jombang
11	DINAS SOSIAL	22	INTUISI	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)
		23	SIDASU	53 Perangkat Daerah	Sistem Data Sosial Terpadu

No	Perangkat Daerah Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Perangkat Daerah Pengguna Sistem Elektronik	Keterangan
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24	E-LITBANG	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan
		25	SI-PEDAL CANTIG	53 Perangkat Daerah	Sistem integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
		26	PIPA	53 Perangkat Daerah	Sistem Perencanaan Penganggaran
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN RAKYAT	27	SIMENARA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN RAKYAT	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi
		28	Tarunah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN RAKYAT	Layanan Tata Ruang dan Pertanahan
14	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	29	SIKEMBANG	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	SIRINDUNONA	53 Perangkat Daerah	Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Non Berusaha Secara Elektronik
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	31	SIAP-ASN	53 Perangkat Daerah	Layanan Kepegawaian
		32	BKPSDM	53 Perangkat Daerah	Layanan Kepegawaian
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	33	BAPENDA	53 Perangkat Daerah	Layanan Pajak
		34	e-Potensi	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Layanan Monitorong Pajak
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	35	SISKEUDES	21 KECAMATAN	Sistem Informasi Keuangan Desa
		36	Sabdopalon	21 KECAMATAN	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37	DISDIKBUD	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Pendidikan
		38	PPDB	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi PPDB online
20	DINAS KESEHATAN	39	Si-Imun	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Imunisasi
		40	Simpus	DINAS KESEHATAN	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
21	SATPOL PAMONG PRAJA	41	Simmas	SATPOL PAMONG PRAJA	Satuan Perlindungan Masyarakat
22	INSPEKTORAT	42	e-audit	53 Perangkat Daerah	Sistem e-audit
23	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL	43	Dukcapil	53 Perangkat Daerah	Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	KECAMATAN MOJOWARNO	44	Sigap	53 Perangkat Daerah	Sistem Standar Pelayanan Kecamatan Mojowarno
25	KECAMATAN PLANDAAN	45	Sipaduka	53 Perangkat Daerah	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	46	Data-srikandi	53 Perangkat Daerah	Layanan Data Srikandi
		47	template	53 Perangkat Daerah	Template Naskah Srikandi

No	Perangkat Daerah Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Perangkat Daerah Pengguna Sistem Elektronik	Keterangan
		48	INLIS DISPERSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Manajemen Perpustakaan yang Terintegrasi

- Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo

$$11/11 \times 100\% = 100\%$$

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	R. WITCAKSONO SETYO P, S.Si, M.Eng	198009142005011007	Sertifikasi
2	ELOK SRI WAHYUNI, S.Kom., M.T	197611242005012009	Sertifikasi
3	NURIYAH JAUHAR KAMILAH BASA, S.Kom	198305202011012004	Sertifikasi
4	M. JAZULI, S.T	1972001182001121001	Sertifikasi
5	DANY HARDYANTO, S.Kom	198111232010011002	Sertifikasi
6	FIRLANA NURDIANSYAH, S.Kom	198302252011011004	Sertifikasi
7	ANUGERAH ANANG, AMd	198305212006041008	Sertifikasi
8	ALIVIA RAHMAWATI, AMd	199807232020122003	Sertifikasi
9	LAVANNA INDANUS RAMADHAN, S.Kom	199601302019031003	Sertifikasi
10	MOCHAMAD NUR HASAN, AMd	199902072022031002	Sertifikasi
11	NUR FATIH, S.Kom	198907252015052001	Sertifikasi

- Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government

DAFTAR PERATURAN DAERAH ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH

TERKAIT IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT

DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

NO	DOKUMEN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT
1	2
1	ARSITEKTUR SPBE
2	MASTERPLAN SMARTCITY
3	PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
4	SK TIM KOORDINASI DAN TIM ASSESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN SPBE KABUPATEN JOMBANG
5	SK TIM FORUM DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG
6	KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 188.4.45/355/415.10.1.3/2019 TENTANG TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN JOMBANG
7	KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 188.4.45/179/415.10.1.3/2022 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN JOMBANG
8	KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 188.4.45/174/415.10.1.3/2022 TENTANG TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
9	KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/188/415.23/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dari dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

IKK Outcome/Hasil

(87.633) Jumlah masyarakat yang menjadi penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Kota

$$\frac{(87.633)}{(961.706) \text{ Jumlah Penduduk}} \times 100\% = 91,257$$

**DATA PELAKSANAAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

No	URAIAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1	Jumpa fans HUT Radio SJFM	Radio SJFM	125 peserta
2	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Regional	Lapangan Ds. Pojok Klitih Plandaan	500 peserta
3	Goes To School	SMAN Ploso	75 peserta
4	Pembinaan KIM	Kecamatan Plandaan Desa Pojok Klitih	90 peserta
5	Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi KKD	Bung Tomo Pemkab Jombang	79 peserta
6	Kegiatan Kopilaborasi Pegiat Medsos dan Silaturahmi Media	Rumah Dinas Bupati Jombang	200 peserta
7	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Regional	Lapangan Ds. Jogoroto	500 peserta
8	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal	Pendopo Kabupaten Jombang	250 peserta
9	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Regional	Lapangan Ds. Tamping Mojo Tembelang	500 peserta
10	Rakor Pejabat Penghubung Lapor SP4N	Suro I Pemkab Jombang	80 peserta
11	Sosialisasi Lapor SP4N	Aula Dinas Kominfo	110 peserta
12	Kopilaborasi Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Jombang	Halaman Parkir Pendopo Kabupaten Jombang	150 peserta
13	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal	Aula Dinas Kominfo	125 peserta
14	Jumlah Total Pengunjung website Jombangkab	Jombangkab.go.id	114,500 pengunjung
15	Instagram @jombangkab	Instagram	21,100 pengikut

16	Jumlah Viewer instagram @jombangkabtv	instagram	48,800 viewer
17	Jumlah Pengikut Instagram @kominfo_jombang	Instagram	3,538 pengikut
18	Pengikut di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4,999 pengikut
19	Pengikut di Youtube Jombangkab TV	Youtube	1,200 pengikut
20	Jumlah Viewer Youtube Jombangkab TV	Youtube	67,512 Viewer
21	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21 Kecamatan Jadwal Talkshow Interaktif Radio - Senin 09.00 -10.00 Mitra Tani 12.00 - 13.00 Kiat Mandiri - Selasa 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 10.00 - 11.00 Plesir - Rabu 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 12.00 - 13.00 Sehat Bersama RSUD - Kamis 09.00 - 10.00 Halo Anak 12.00 - 13.00 Pojok Tamu - Jumat 09.00 - 10.00 Pojok Demokrasi	Frekuensi 104.1 FM, live, talkshow dan streaming radio online	613,200 orang
Total			877,633

- Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota

$$34/34 \times 100\% = 100\%$$

REKAPITULASI KOMUNITAS MASYARAKAT/ MITRA STRATEGIS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2024

NO	NAMA KOMUNITAS	STATUS	KETERANGAN
1	PWI Kabupaten Jombang	AKTIF	Persatuan Wartawan Indonesia
2	Jombang Travel	AKTIF	Komunitas Pegiat Pariwisata di Kab. Jombang
3	UKM Jombang	AKTIF	Komunitas UMKM di Kab. Jombang
4	KIM Desa Menturus, Kudu	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Menturus Kecamatan Kudu
5	KIM Desa Japanan, Mojowarno	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Japanan Kecamatan Mojowarno
6	KIM Desa Kwaron, Diwek	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Kwaron Kecamatan Diwek
7	Info Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
8	Event Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
9	Warga Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
10	Info Loker Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
11	Info Seputar Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
12	Jombang Loker	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
13	Jombang Mbois	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
14	Kuliner Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
15	Jombang Awesome	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
16	Jombang Suka Suka	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
17	Jombang Informasi	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
18	Jombang Maneh	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
19	Siswa Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
20	Jombang Paradise	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
21	Jombang Hits	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
22	Pesona Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
23	Info Wilayah Jombang	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang

24	Informasi Jombang Beriman	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
25	Info Jombang Cepat	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
26	Info Seputar Mojoagung	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
27	Explore Wonosalam	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
28	Info Lantas Kriminal Jombang	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
29	Kiki Anjani	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
30	Wonderful Wonosalam	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
31	Wongg Jombang TV	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
32	Wisata Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
33	Njombangan	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
34	Jombang Bangkit	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
JUMLAH		34	34

- Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)

127 jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi komunikasi (STRAKOM) $\times 100\% = 100\%$

127 jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui portal resmi Jombangkab

REKAPITULASI KEGIATAN DISEMINASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2024

NO	DISEMINASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKSANAKAN SESUAI STRATEGI KOMUNIKASI	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Peraturan Daerah	11	https://jdih.jombangkab.go.id
2	Peraturan Bupati	115	https://jdih.jombangkab.go.id
3	Keputusan Bupati	1	https://jdih.jombangkab.go.id
JUMLAH		127	

- Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah

ditetapkan

127 Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
----- x 100%
127 Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dipublikasikan

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui website JDIH dan portal resmi Jombangkab.

REKAPITULASI KEGIATAN DISEMINASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2024

NO	DISEMINASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKSANAKAN SESUAI STRATEGI KOMUNIKASI	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Peraturan Daerah	11	https://jdih.jombangkab.go.id
2	Peraturan Bupati	115	https://jdih.jombangkab.go.id
3	Keputusan Bupati	1	https://jdih.jombangkab.go.id
JUMLAH		127	

PERSANDIAN

Output

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Hasil evaluasi telah dijabarkan dalam **Dokumen Assesmen Keamanan Teknologi Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2023** yang telah diserahkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, adapun hasil evaluasi akhir seperti yang tercantum dalam **Dokumen Assesment Keamanan Teknologi Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2023** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Keamanan Informasi

Tabel 4. 1 Presentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi.

Ket	Skor Max	Skor Responden	Presentase
T. Kelola	126	94	75%
P. Risiko	72	40	56%
K. Kerja	192	135	70%
P. Aset	258	154	60%
Tekno	186	128	69%
PDP	84	46	55%

Data yang telah dihasilkan melalui pengisian kuesioner Indeks KAMI versi 5.0 tahun 2023 oleh responden dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan area pertanyaan Indeks KAMI dan dari data pengukuran Indeks KAMI Tahun 2022 akan dilakukan validasi dengan cara checklist. Checklist dilakukan untuk mendukung hasil dari kuesioner dan melihat bukti dari keadaan asli.



Gambar 4. 1 Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi

Gambar 4.1 menunjukkan tingkat kategori sistem elektronik yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berada pada kategori yang tinggi, dengan skor 26. Dimana keberlangsungan proses kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sangat bergantung besar pada penggunaan sistem elektronik. Sementara dari tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 berada pada level "Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar" dengan level skor 597, ini menunjukkan bahwa dengan tingginya ketergantungan instansi terhadap sistem elektronik belum didukung sepenuhnya dengan keamanan informasi yang memadai untuk seluruh instansi. Dengan hasil evaluasi akhir ini juga menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang masih membutuhkan perbaikan.

Sistem Eletronik yang telah dibangun di Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Jombang berkategori **Tinggi**, dengan skor akhir asesment Indeks KAMI yang dicapai sebesar **597 dari total skor maksimal 645 dari per area 6 penilaian**, sehingga hasil akhir untuk kelengkapan pemenuhan standar SNI ISO : 27001 masih tergolong **Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar**, sehingga masih dibutuhkan beberapa pembenahan dalam beberapa area agar meningkat cukup baik.

Dari tabel di atas disimpulkan Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil pada tingkat keamanan informasi adalah sebagai berikut :

Jumlah nilai per area keamanan informasi (597)

_____ x 100% = 92.5581%

Jumlah area penilaian (645)

Outcome :

- Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.

**KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
YANG DILAKUKAN PENGAMANAN SINYAL**

TAHUN 2024

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN STRATEGIS	KETERANGAN
1	JANUARI	6	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
2	FEBRUARI	4	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
3	MARET	4	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
4	APRIL	2	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
5	MEI	4	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
6	JUNI	1	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)

- Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG MENERAPKAN PRINSIP MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI (SMKI) DAN DIAMANKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

TAHUN 2024

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan	Diamankan sertifikat elektronik dan aplikasi penyandian (Ya/Tidak)
1	DINAS KOMUNIKASI	1	Mail	https://mail.jombangkab.go.id	Layanan Email Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang	Ya

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan	Diamankan sertifikat elektronik dan aplikasi penyandian (Ya/Tidak)
	DAN INFORMATIKA	2	Web Jombangkab	https://jombangkab.go.id	Layanan Website Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang	Ya
		3	SAMBANG	https://sambang.jombangkab.go.id	Layanan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Jombang	Ya
		4	Streaming SJFM	https://sjfm.jombangkab.co.id	Sistem Informasi Streaming Radio Suara Jombang	Ya
		5	CLOUD	https://cloud.jombangkab.go.id	Layanan database	Ya
		6	SIDAVID	https://datacovid.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Covid	Ya
		7	e-Office	https://e-office.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Kepegawaian	Ya
		8	Serapan	https://serapan.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Serapan Anggaran	Ya
		9	Satset	https://satset.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik	Ya
2	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	10	BRAVO	https://bravo.jombangkab.go.id	Layanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik	Ya
3	SEKRETARIAT DAERAH (BAG TATA PEMERINTAHAN)	11	Lentera	https://lentera.jombangkab.go.id	Layanan Tata Pemerintahan	Ya
4	SEKRETARIAT DAERAH (BAG HUKUM)	12	JDIH	https://jdih.jombangkab.go.id	Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum	Ya
5	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	13	Sukmasantri	https://sukmasantri.jombangkab.go.id	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Ya
6	SEKRETARIAT DAERAH (BAG PBJ)	14	SIBAJA	https://sibaja.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Ya
7	SEKRETARIAT DAERAH (PBJ)	15	SPSE	https://lpse.jombangkab.go.id	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Ya
8	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	16	Simpel ON	https://simplen.jombangkab.go.id	Sistem Pelaporan Penyedia Jasa Konstruksi/Konsultan dalam Pelaporan Pekerjaan	Ya
9	DINAS PERTANIAN	17	TRAKTOR	https://traktorpertanian.jombangkab.go.id	Sistem tracking dan monitor berupa data dan informasi potensi wilayah oleh para penyuluh pertanian di wilayah binaan	Ya
		18	ADAPTIF	https://adaptif.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang	Ya
		19	SIMFONI	https://simfoni.jombangkab.go.id	Sistem Informasi GAPOKTAN	Ya
10		20	DLH	https://dlh.jombangkab.go.id	Layanan Laporan Periodik Pelaksanaan	Ya

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan	Diamankan sertifikat elektronik dan aplikasi penyandian (Ya/Tidak)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				Dokumen AMDAL/UKL-UPL	
		21	SILAJANG	https://silajang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Laboratorium Jombang	Ya
11	DINAS SOSIAL	22	INTUISI	https://intuisi.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)	Ya
		23	SIDASU	https://sidasu.jombangkab.go.id	Sistem Data Sosial Terpadu	Ya
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24	E-LITBANG	https://e-litbang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan	Ya
		25	SI-PEDAL CANTIG		Sistem integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Ya
		26	PIPA	https://pipa.jombangkab.go.id	Sistem Perencanaan Penganggaran	Ya
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN RAKYAT	27	SIMENARA	https://simenara.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi	Ya
		28	Tarunah	https://layanan-pupr.jombangkab.go.id	Layanan Tata Ruang dan Pertanahan	Ya
14	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	29	SIKEMBANG	https://sikembang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga	Ya
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	SIRINDUNONA	https://perizinan.jombangkab.go.id	Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Non Berusaha Secara Elektronik	Ya
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	31	SIAP-ASN	https://siapasn.jombangkab.go.id	Layanan Kepegawaian	Ya
		32	BKPSDM	https://bkpsdm.jombangkab.go.id	Layanan Kepegawaian	Ya
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	33	BAPENDA	https://bapenda.jombangkab.go.id	Layanan Pajak	Ya
		34	e-Potensi	https://layanan-bapenda.jombangkab.go.id/e-potensi/login	Layanan Monitorong Pajak	Ya

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan	Diamankan sertifikat elektronik dan aplikasi penyandian (Ya/Tidak)
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	35	SISKEUDES	Siskeudes (desktop)	Sistem Informasi Keuangan Desa	Ya
		36	Sabdopalon	https://sabdopalon.jombangkab.go.id/	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa	Ya
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37	DISDIKBUD	https://disdikbud.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Pendidikan	Ya
		38	PPDB	https://ppdb.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi PPDB online	Ya
20	DINAS KESEHATAN	39	Si-Imun	https://si-imun.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Imunisasi	Ya
		40	Simpus	https://simpus.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	Ya
21	SATPOL PAMONG PRAJA	41	Simmas	https://simmas.jombangkab.go.id/	Satuan Perlindungan Masyarakat	Ya
22	INSPEKTORAT	42	e-audit	https://inspektorat.jombangkab.go.id/	Sistem e-audit	Ya
23	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL	43	Dukcapil	https://dukcapil.jombangkab.go.id/	Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya
24	KECAMATAN MOJOWARNO	44	Sigap	https://sigap.jombangkab.go.id/	Sistem Standar Pelayanan Kecamatan Mojowarno	Ya
25	KECAMATAN PLANDAAN	45	Sipaduka	https://sipaduka.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Ya
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	46	Data-srikandi	https://data-srikandi.jombangkab.go.id/	Layanan Data Srikandi	Ya
		47	template	https://template.jombangkab.go.id/	Template Naskah Srikandi	Ya
		48	INLIS DISPERSIP	Inlis dispersip (desktop)	Manajemen Perpustakaan yang Terintegrasi	Ya

- Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

$$\begin{array}{l}
 \text{Jumlah nilai per area keamanan informasi} \\
 \text{-----} \\
 \text{Jumlah area penilaian}
 \end{array}
 \times 100\%$$

$$\frac{0}{48} \times 100\% = 0\%$$

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG DIAUDIT DENGAN RESIKO KATEGORI TINGGI
DI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan	Kategori Sistem Elektronik (Rendah/Tinggi)
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Mail	https://mail.jombangkab.go.id	Layanan Email Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang	Tinggi
		2	Web Jombangkab	https://jombangkab.go.id	Layanan Website Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang	Tinggi
		3	SAMBANG	https://sambang.jombangkab.go.id	Layanan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Jombang	Tinggi
		4	Streaming SJFM	https://sjfm.jombangkab.co.id	Sistem Informasi Streaming Radio Suara Jombang	Tinggi
		5	CLOUD	https://cloud.jombangkab.go.id	Layanan database	Tinggi
		6	SIDAVID	https://datacovid.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Covid	Tinggi
		7	e-Office	https://e-office.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Kepegawaian	Tinggi
		8	Serapan	https://serapan.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Serapan Anggaran	Tinggi
		9	Satset	https://satset.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik	Tinggi
2	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	10	BRAVO	https://bravo.jombangkab.go.id	Layanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik	Tinggi
3	SEKRETARIAT DAERAH (BAG TATA PEMERINTAHAN)	11	Lentera	https://lentera.jombangkab.go.id	Layanan Tata Pemerintahan	Tinggi
4	SEKRETARIAT DAERAH (BAG HUKUM)	12	JDIH	https://jdih.jombangkab.go.id	Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum	Tinggi
5	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	13	Sukmasantri	https://sukmasantri.jombangkab.go.id	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Tinggi
6	SEKRETARIAT DAERAH (BAG PBJ)	14	SIBAJA	https://sibaja.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tinggi
7	SEKRETARIAT DAERAH (PBJ)	15	SPSE	https://lpse.jombangkab.go.id	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tinggi
8	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	16	Simpel ON	https://simplen.jombangkab.go.id	Sistem Pelaporan Penyedia Jasa Konstruksi/Konsultan dalam Pelaporan Pekerjaan	Tinggi
9	DINAS PERTANIAN	17	TRAKTOR	https://traktor-pertanian.jombangkab.go.id	Sistem tracking dan monitor berupa data dan informasi potensi wilayah oleh para penyuluh pertanian di wilayah binaan	Tinggi
		18	ADAPTIF	https://adaptif.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang	Tinggi
		19	SIMFONI	https://simfoni.jombangkab.go.id	Sistem Informasi GAPOKTAN	Tinggi

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan	Kategori Sistem Elektronik (Rendah/Tinggi)
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20	DLH	https://dlh.jombangkab.go.id	Layanan Laporan Periodik Pelaksanaan Dokumen AMDAL/ UKL-UPL	Tinggi
		21	SILAJANG	https://silajang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Laboratorium Jombang	Tinggi

- Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.

REKAPITULASI TITIK TERAMANKAN PADA TITIK PHKS
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

NO	TITIK TERAMANKAN	TITIK PHKS
1	2	3
1	1 (sanapati)	1 (sanapati)

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil revidu pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berlangsung cukup baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparaturnya dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam penyelenggaraan penyampaian informasi di pemerintah daerah di berbagai wilayah dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang krusial dalam rangka pengembangan penyampaian informasi, diantaranya :

Form Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
1	2	3	4
Terbatasnya Informasi Publik yang diterima masyarakat	Keterbatasan Akses Informasi yang diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
	Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik		
	Pembinaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang belum optimal		
Masih Rendahnya Pemanfaatan Aplikasi OPD dalam meningkatkan	Sistem Aplikasi yang dibangun OPD sulit untuk diintegrasikan	Indeks SPBE	Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
	Belum optimalnya pembangunan /		

pelayanan kepada masyarakat	penyediaan jaringan internet dalam rangka meningkatkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik		
	Pada saat pembuatan aplikasi tidak berkoordinasi dengan Dinas Kominfo		
Masih rendahnya Indeks SPBE	Komitmen OPD di Lingkungan Pemkab masih		
	kurang khususnya dalam Pelaksanaan SPBE		
	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal		
Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi	Indeks KAMI BSSN	
	Terbatasnya Tenaga Teknis untuk Pengamanan Informasi		
	Antrian penanganan sertifikat elektronik di BSSN		
Kesulitan pengumpulan data sektoral yang ada pada OPD	OPD menunda/ tidak mengirim data sektoral yang diminta	Portal Satu Data Kabupaten Jombang	
Inkonsistensi data	Metodologi yang digunakan dan jangka waktu yang dipakai		
	Keterbatasan SDM yang baik dari segi jumlah maupun pengetahuan		
Belum ada standarisasi data dan kualitas analisis data yang belum terjamin	terdapat kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan data yang tersedia		
	perubahan alur pengumpulan data sektoral		

Usaha penanggulangan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah:

- Pengembangan aplikasi teknologi dan informasi guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui *e-government* tanpa harus datang ke kantor dengan memberikan layanan media komunikasi elektronik selain di website juga melalui android dan IOS.
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuan komunikasi dan Informatika
- Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat.

Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang;
2. Peningkatan kapasitas SDM di OPD yang difungsikan menjadi Humas;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana;
4. Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD;
5. Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah;
6. Pengembangan infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi

7. Pengembangan infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi
8. Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah
9. Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi
10. Penguatan daya dukung PD untuk pelaksanaan SDI; kapasitas SDM; sarpras portal satu data; data prioritas yang ditetapkan.
11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data

Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (government public relations).
7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2024, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil Musrenbang pada Dinas Kominfo Untuk tahun 2024 tidak ada usulan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai hubungan nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah. Sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN 2020-2024 VISI : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi dan Misi Kemenkominfo selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, meliputi :

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;

3. Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektor yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur.

VISI Dinas Kominfo Prov. Jawa Timur yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" dan MISI 3 yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan mengacu misi ke tiga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan TIK;
2. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media;
3. Mengimplementasikan e-Government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD;
5. Mewujudkan Satu Data di Jawa Timur

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu "Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yaitu :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketentraman umum;
- Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrem;
- Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah

Tujuan RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik. Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan konsep pelayanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi dan digitalisasi layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dari Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renja Tahun 2024 Dinas Kominfo yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik.

Sasaran kinerja Dinas Kominfo yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

FORM TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif Serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
							Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)
							Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK)
							Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
							Indeks Pembangunan Statistik
							Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

- a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan di tahun 2024 yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026. Program pembangunan Dinas Kominfo tahun 2024 pada dasarnya menselaraskan prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya :

1. Mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan diformulasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Perubahan kegiatan-kegiatan dilakukan harus dalam rangka:
 - a. Optimalisasi pencapaian target kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, khususnya untuk capaian target kinerja tahun 2024 dan selaras dengan temapembangunan tahun 2024 yakni: “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonom Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”.
 - b. Penanganan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah yang harus segera di tindaklanjuti dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan, Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penanganan Stunting, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata;
 - c. Pencapaian target SDG’s (Sustainable Development Goals) sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Akselerasi dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

- telah ditetapkan oleh Kementerian;
- e. Menindaklanjuti kebijakan Nasional dan Provinsi yang harus dialokasikan di daerah.
3. Output kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan APBD 2024 harus dapat diselesaikan pada tahun berkenaan;
4. Pengurangan anggaran kegiatan harus disertai dengan penjelasan secara lengkap dan dukungan yang menyatakan bahwa capaian target output sub kegiatan, output kegiatan dan outcome Program yang telah ditetapkan di RKPD/Renja PD Tahun 2024 tetap tercapai walaupun adanya pengurangan anggaran kegiatan;
5. Usulan penambahan anggaran kegiatan harus disertai dengan penjelasan secara lengkap dan dukungan yang menyatakan bahwa penambahan tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Tahun 2024 antara lain :

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.4 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.5 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.3.6 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.4.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

1.5.3 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

1.5.4 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.1 Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

2.1.2 Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2.1.3 Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.2 Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3.2.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

3.2.2 Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

3.2.3 Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3.2.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

3.2.5 Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota

3.2.6 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/ Kota

- 4.1.1 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
- 4.1.2 Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik yang Terintegrasi
- 4.1.3 Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor
- 4.1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
- 4.1.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH/KOTA

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi Pemerintah Daerah/Kota

- 5.1.1 Subkegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
- 5.1.2 Subkegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
- 5.1.3 Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
- 5.1.4 Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Publik tahun 2024 dilaksanakan sebagai berikut :

Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

- Pekan KIM JATIM
- Pelatihan Penguatan Kanal Informasi Publik di OPD
- Workshop dan Sosialisasi Komite Digital
- Workshop Pembinaan dan Pelatihan KIM;

KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah didalam penyebarluasan berbagai informasi yaitu produk atau potensi – potensi yang belum diketahui oleh publik baik dari media medsos seperti facebook dan instagram serta media lainnya. Dinas Kominfo menyelenggarakan

workshop untuk pembinaan dan pelatihan KIM yaitu dengan pelatihan pembuatan website.

- Sosialisasi Penguatan Lapor SP4N;

LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu. LAPOR! dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan sosialisasi LAPOR SP4N untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan aduan permasalahan atas pelayanan publik.

Kegiatan dimaksudkan untuk menjemput informasi atau aduan warga atas pelayanan umum maupun pengaduan warga terhadap fasilitas umum. Selain itu juga mengenalkan pada masyarakat tentang tata cara penyampaian aduan melalui saluran yang benar dan tepat.

- Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kepemerintahan;

PPID yang ada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bertugas mengelola datad an informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melaksanakan sosialisasi Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui sosialisasi ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintah desa.

- Public Speaking Goes To School
- Jumpa Fans Dalam Rangka bersama HUT Radio SJFM
- Terlaksananya Warjok lokal (menginformasikan kepada masyarakat kegiatan informasi daerah), dan publikspeaking di sekolah Jombang;

Berdasarkan keterbukaan informasi publik untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program “Warung Pojok” disingkat Warjok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mengadakan rutin kegiatan dialog interaktif dan solutif pada setiap bulannya Kegiatan dialog interaktif dan solutif lokal dikemas dalam perbincangan atau percakapan dengan topik yang dipilih menghadirkan narasumber.

- Penyebarluasan informasi terkait kegiatan Pemerintah Daerah melalui website Jombangkab dan Kanal resmi media social

Untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menyebarluaskan informasi melalui website jombangkab.go.id, Instagram pemkab Jombang dan channel Youtube Kabupaten Jombang.

- Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana radio dilakukan melalui radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM). Program siaran radio dengan 7 program perhari melalui SJFM meliputi:

PROGRAM SIAR REGULER

RADIO PUBLIK LOKAL SUARA JOMBANG FM 104,1

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
04.00	Opening & Lagu Indonesia Raya	Putar File untuk opening siaran	Pop
04.00-07.00	-Tartil ‘Qur’an, Tarhim, Adzan Shubuh -Kajian Islam Pagi Suara Jombang	Putar File Pengajian KH. Djamaluddin Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Tambakberas Jombang	Religi Islami
07.00-08.00	Cakrawala sesi I	INFORMASI Siaran kata; Menghadirkan informasi lokal Jombang (politik, ekonomi, sosial, budaya) ; Mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi atau berkomentar baik melalui jalur telepon, WA, atau sms; Konfirmasi dengan narasumber terkait dengan isu lokal yang sedang hangat dibicarakan.	Indonesia pertengahan (rancak)

		1. INFORMASI perbincangan isu nasional	
08.00-10.00	Cakrawala Sesi II	2. TALKSHOW INTERAKTIF Senin : 07.00-08.00 Dinamika Jawa Timur ; Relay Program Asosiasi LPPL Jawa Timur 09.00-09.40 Insidental 10.00-11.00 Nasional Is Me ; Relay Program Asosiasi LPPL, Persada.Id Selasa : 09.00-09.40 Talkshow Anti Hoax (MAFINDO Koord. Jombang) 10.00-10.40 PELESIR ; Talkshow Pariwisata bersama BPPD Kab. Jombang Rabu : 09.00-09.40 Pojok Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Jombang) 11.00-11.40 Talkshow Covid 19 bersama IDI Kab. Jombang Kamis : 09.00-09.40 Kiat mandiri bersama UMKM dan Enterpreneur Muda Jombang 10.00-11.00 Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit KPC PEN; Persada.Id. Jum'at : 09.00-09.40 Halo Anak; BPPKB-PPPA >>> Membuka line telepon, WA atau SMS untuk interaktif pendengar Putar File Berita hasil produksi liputan TimReportase	Indonesia Pertengahan (boleh slow)
10.00-12.00	Break In Time	HIBURAN Siaran kata dengan menyisipkan info info ringan seputar lifestyle, selebritis dan info info ringan lainnya. >> Putar Adzan Dhuhur sesuai dengan jadwal waktu Shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya dengan Hot clock yang ditetapkan	Mancanegara EasyListening (Non Hits)
12.00 – 13.00	Jombang Interaktif	INFORMASI Dibawakan oleh satu orang announcer dibantu oleh dua orang gatekeeper. Menghadirkan tema yang beragam di setiap harinya. Tema diambil dari kebutuhan masyarakat atas informasi maupun pelayanan publik. Nara sumber dihadirkan melalui wawancara telepon dengan announcer. Jumlah nara sumber menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan tema. Nara sumber diambilkan dari OPD terkait atau lembaga-lembaga swasta yang berwenang untuk memberikan klarifikasi atas suatu masalah, atau berwenang untuk memberikan informasi. Nara sumber sudah dipersiapkan sebelumnya untuk bisastandby dalam rentang waktu antara 12.00 s/d 13.00. Program ini mengundang masyarakat untuk berinteraktif melalui dua jalur (telepon dan WA), untuk memberikan laporan keluhan atau komentar atas tema yang dibahas.	Manca – Indo Hits

13.00-15.00	Gayeng Marem	HIBURAN Siaran kata dengan menggunakan bahasa Jawa Jombangan; menemani pendengar beristirahat siang dengan gending dan campur sari; membuka line interaktif dengan pendengar melalui telepon, WA atau SMS. Informasi terkini lokal/nasional/Internasional (sumber:Detik.com/ Kompas/Liputan6/SS.net ,	Gending & Campur Sari
15.00-17.00	DANSA Dangdut Asyik SuaraJombang	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beraktifitas santai di sore hari' membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Konvensional
17.00-18.00	Jelang Petang	- Putar File Lagu - Putar Adzan Maghrib menyesuaikan dengan jadwal waktu shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya Putar Murattal	Lagu Religi
18.00-19.00	Senada indonesia POP	HIBURAN Putar File ; segmentasi anak muda; men ghadirkan tangga nada lagu teratas di setiap minggunya;	Lagu Indonesia HITS
19.00-21.00	Goyang Dangdut Malam	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beristirahat di malam hari; membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Koplo Terbaru
21.00 – 22.00	Muaik Ingat-Ingat	HIBURAN Putar File ; segmentasi dewasa; men ghadirkan lagu oldies Indonesia; Pengantar istirahat malam	Lagu oldies Indonesiaera 70-80an
22.00-23.00	Ngakak Bareng Kartolo	Putar File Senin – Rabu, Jum'at : Lawakan Kartolo Kamis : Shalawat Minggu : Wayang Kulit	-
23.00	Closing & Lagu Wajib Nasional	Putar file lagu untuk closing siaran	
Program PERNIK			
Menit ke- 00 02 15 30 45	Update Info Covid 19 Informasi Hoax Lintas Informasi Lokal Info Korupsi KPK Lintas Informasi Nasional	Putar File yang diproduksi dan ready setiap hari	-

- Ngopi Bareng Pegiat Medsos

Ngopi bareng Pegiat Medsos adalah Kopilaborasi Pegiat Medsos dalam rangka menunjang Publikasi Pemerintah Daerah dan Potensi Kabupaten Jombang. Tujuan dari kegiatan Kopilaborasi Pegiat Medsos Jombang ini untuk meningkatkan partisipasi serta umpan balik yang positif terhadap semua aktivitas kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang para pegiat media social dan forpimda.

- Silaturahmi dengan Media

Silaturahmi dengan media merupakan kegiatan mengundang para wartawan dari media cetak dan media elektronik serta formpimda. Tujuan dari kegiatan Silaturahmi dengan media ini untuk meningkatkan partisipasi serta umpan balik yang positif terhadap semua aktivitas kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh semua organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

- Literasi Digital ANTI Hoax

Bidang Aplikasi Teknologi Informasi

- Penyediaan jaringan FO untuk OPD perkotaan maupun jaringan wireless kecamatan untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Pembangunan jaringan FO untuk seluruh OPD milik Pemkab, untuk meningkatkan legalitas penggunaan FO;
- Peningkatan kapasitas jaringan wireless (penggantian perangkat) pada 21 kecamatan dan repeater untuk meningkatkan kapasitas jaringan interner 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Bandwidth 1 GB untuk OPD;
- Penyediaan ruang server yang sesuai dengan standart SNI untuk fasilitasi hosting aplikasi pemerintah;
- Integrasi aplikasi pemerintahan dan layanan umum;
- Pengembangan dan pembangunan aplikasi baru untuk mendukung layanan pemerintahan dan layanan umum sebagaimana diamanatkan dalam perpres SPBE.

Bidang Statistik dan Persandian

- Mendorong OPD untuk update data sektoral secara berkala melalui portal satu data Kabupaten Jombang (satudata.jombangkab.go.id);

Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan OPD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik.

- Penyusunan Indeks KAMI dan Sosialisasi Hasil Penilaian Indeks KAMI

Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Penyusunan Indeks KAMI pada Dinas Kominfo adalah melakukan evaluasi terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu : (1) Tata Kelola Keamanan Informasi; (2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi; (3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi; (4) Pengelolaan Aset informasi; (5) Teknologi dan Keamanan Informasi; (6) Peran TIK. Penyusunan Indeks KAMI disosialisasikan dengan mengundang Perangkat Daerah sebagai dasar evaluasi peningkatan aspek tata Kelola keamanan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Sosialisasi Raperbup SMKI Pemetaan Keamanan Informasi.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA
PD TAHUN 2024**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024			Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
								Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K		Rp. (.000)
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
1																		
1	01																	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	Persen	7.047.874.897	25%	2.197.554.707	100	Persen	9.161.236.090	0	2.113.361.193		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100	Persen	51.896.000	25%	13.875.000	100	Persen	131.896.000	0	80.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3	Dokumen	25.888.000	0 dokumen	10.457.000	5	Dokumen	105.888.000	2 dokumen	80.000.000	Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Rp. 80.000.000	

Kode			Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024			Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
							Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
							K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K		Rp. (.000)
1			2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5	Laporan	26.008.000	1 Laporan	3.418.000	1	Laporan	26.008.000	0	0	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	100%	100	Persen	5.191.460.782	25%	1.692.190.147	100	Persen	5.219.684.548	0	28.223.766	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	32 orang/bulan	32	Orang/bulan	4.977.234.782	32 orang/bulan	1.643.530.147	32	Orang/bulan	5.008.018.548	0	30.783.766	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4	Dokumen	209.506.000	1 dokumen	46.200.000	4	Dokumen	206.946.000	0	-2.560.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1	Laporan	4.720.000	0 dokumen	2.460.000	1	Laporan	4.720.000	0	0	

Kode			Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024			Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
							Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
							K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K		Rp. (.000)
1	2			3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100	Persen	419.160.850	25%	61.044.003	100	Persen	458.524.050	0	39.363.200	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12	Paket	13.819.800	4 paket	0	12	Paket	13.819.800	0	0	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12	Paket	104.912.800	4 paket	1.477.000	12	Paket	87.348.000	0	-17.564.800	Berkurang dialihkan ke sub kegiatan lain (17.564.800) yaitu anggaran arsip box (13.800.000), materai (5.000.000), pengurangan buku cek bank (1.850.600) + penambahan catridge (10 buah = 3.086.000)
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6	Paket	127.285.000	6 paket	18.794.000	6	Paket	122.713.000	0	-4.572.000	

Kode			Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024			Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
							Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
							K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)			
1	2			3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	5	Paket	51.868.700	5 paket	20.789.500	5	Paket	51.868.700	0	0	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3	Dokumen	12.612.000	3 dokumen	840.000	3	Dokumen	12.612.000	0	0	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5	Laporan	108.662.550	4 laporan	19.143.503	5	Laporan	170.162.550	0	61.500.000	Usulan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100	Persen	711.955.400	25%	168.687.881	100	Persen	673.995.400	0	-37.960.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12	Laporan	393.000.000	4 laporan	101.085.075	12	Laporan	368.000.000	0	-25.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12	Laporan	318.955.400	4 laporan	67.602.806	12	Laporan	305.995.400	0	-12.960.000	

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan		
								Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)			
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100	Persen	673.401.865	25%	261.757.676	100	Persen	2.677.136.092	0	2.003.734.227		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1	Unit	42.110.000	1 unit	6.992.230	1	Unit	40.610.000	0	-1.500.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	17	Unit	232.374.610	17 unit	15.399.200	17	Unit	198.774.610	0	-33.600.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2	Unit	106.342.475	2 unit	79.076.246	2	Unit	358.369.675	0	252.027.200	(1) Usulan Anggaran untuk pemeliharaan gedung berupa pengecatan dinding dan paving Rp. 100.000.000 (2) Partisi Ruang 29 m2 = Rp. 72.027.200 (3) Pemindahan Antena	

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)				Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)				Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023				Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024								Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024				Bertambah/ (Berkurang)		Catatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																				Target Renja 2024				Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				K		Rp. (.000)		K		Rp. (.000)		K		Rp. (.000)		K		Rp. (.000)		K	Rp. (.000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan		
								Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)			
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
																		Polres berupa LED dan rangka konstruksi Rp. 638.550.000 (4) Hibah Kejaksaan Rp. 640.000.000 dan Meubeler kejaksanaan Rp. 150.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang telah memiliki layanan informasi	10	n/a	10	Persen	2.574.862.290	10%	455.400.000	10	Persen	3.557.981.786	0	983.119.496		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan OPD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3.5%	3.2%	3.3%	Persen	2.574.862.290	1.0%	455.400.000	3.3%	Persen	3.557.981.786	0	983.119.496		
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3	n/a	3	Dokumen	1.218.354.900	3 dokumen	360.808.000	3	Dokumen	1.371.432.900	0	153.078.000		

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024				Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
								Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3	n/a	3	Dokumen	1.166.860.700	3 dokumen	94.592.000	3	Dokumen	1.996.902.196	0	830.041.496	Penambahan anggaran untuk Streaming Live + SPPD + Baliho + Banner + Lembur Liputan dan Sewa Videotron sebesar Rp. 123.078.000 dan cukai Rp. 624.964.496
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2	n/a	2	Dokumen	189.646.690	2 dokumen		2	Dokumen	189.646.690	0	0	
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	100	n/a	100	%	5.564.570.499	100%	125.021.718	100	%	5.419.706.420	0	-144.864.079	

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024				Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
								Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intra	53	n/a	53	Perangkat Daerah	3.257.679.920	53 Perangkat Daerah	13.783.915	53	Perangkat Daerah	3.214.823.920	0	-42.856.000		
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	n/a	1	Dokumen	55.771.920	1 dokumen	2.382.915	1	Dokumen	55.771.920	0	0		
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	n/a	1	Unit	3.201.908.000	1 unit	11.401.000	1	Unit	3.159.052.000	0	-42.856.000		
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	2	n/a	2	aplikasi	2.306.890.579	0 aplikasi	111.237.803	2	aplikasi	2.204.882.500	0	-102.008.079		
			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	2	n/a	2	Dokumen	441.845.500	0 dokumen	1.187.500	2	Dokumen	493.037.500	0	51.192.000		

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan			
								Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)									
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)		K	Rp. (.000)	
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14	
					Daerah Kabupaten/Kota														
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	n/a	1	Unit	685.299.079	1 unit	0	1	Unit	676.945.000	0	-8.354.079	
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	n/a	2	Unit	660.796.000	0 unit	90.050.303	2	Unit	542.150.000	0	-118.646.000	
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	n/a	2	Layanan	87.500.000	0 layanan	0	2	Layanan	87.500.000	0	0	
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	n/a	1	Dokumen	401.750.000	1 dokumen	20.000.000	1	Dokumen	371.750.000	0	-30.000.000	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	n/a	1	Dokumen	29.700.000	1 dokumen	0	1	Dokumen	33.500.000	0	3.800.000	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2024			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)							
					K	Rp. (.000)		K	Rp. (.000)		K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
		Pemerintah Daerah													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100	n/a	100	%	386.634.500	100%	9.226.100			493.684.500	0	107.050.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	28	n/a	28	data sektoral	386.634.500	28 data sektoral	9.226.100			493.684.500	0	107.050.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	n/a	2	dokumen	173.118.000	2 dokumen	1.360.000			280.168.000	0	107.050.000	Penambahan anggaran digunakan untuk publikasi Infografis Data Sektoral Kabupaten Tahun 2024 dan Penyusunan Kajian Data Statistik Sektoral Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Sejarah

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)							
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14	
													Pemerintahan di Jombang)	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	n/a	1	dokumen	70.598.000	0 dokumen	5.966.100		70.598.000	0	0	
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1	n/a	1	unit	106.282.000	0 unit	0		106.282.000	0	0	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	n/a	1	dokumen	36.636.500		1.900.000		36.636.500	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	60	n/a	50	%	217.318.700	50%	0		230.943.700	0	-13.625.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	53	n/a	53	Perangkat Daerah	217.318.700	53 Perangkat Daerah	0		230.943.700	0	-13.625.000	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1	n/a	1	dokumen	11.654.900	0 dokumen	0		25.279.900	0	15.425.000	Pemenuhan kelengkapan CSIRT Kab terkait kompetensi/sertifikasi/SDM Agen

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024				Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
								Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)								
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
				Kabupaten/Kota yang Ditetapkan														CSIRT di masing-masing OPD
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	n/a	1	laporan	99.767.000	0 laporan	0			99.767.000	0	0	
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53	n/a	53	Perangkat Daerah	105.896.800	53 perangkat daerah	0			105.896.800	0	0	
TOTAL ANGGARAN										15.791.260.886		2.787.202.525			18.863.552.496		2.900.177.531	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *Good Governance*.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Jombang, maka secara terus menerus perlu dilakukankajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kominfo ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jombang, 22 Juli 2024
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



ENDRO WAHYUDI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 198005281999121001